



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Partisipasi Publik terhadap Kesimpangsiuran Informasi melalui Penyelenggaraan Event “Tur bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta”

Melati Mediana Tobing

Universitas Kristen Indonesia, Cawang No.2, Jakarta 13630, Indonesia

melati.tobing@uki.ac.id

Abstract

The development of child-friendly open spaces (RPTRA) in Jakarta involves 11 leading local architectural institutions with no rewards. They work fast, do the planning process for 3-4 months. In 2016, 188 RPTRA was successfully built and operated throughout Jakarta. Ironically, the development of some of the funds using CSR reap criticism and distrust of some communities. The context of the political situation was quite hot. Various attempts were made political opponents toppled Basuki Thajaja Purnama through hoaxes. To avoid criticism and negative public sentiment on government performance, the architects of the 11 institutions gathered to explain the chronology of RPTRA's creation to the public and the media. Through the event “Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta” the wider community gets real information from various media publicity. According with the sociopetal and sociofugal dimension in proxemics theory, the direct participation of the architect is due to several things in line or opposite, but supporting the development of RPTRA. This public participation at the same time stop the confusion of information, remove slander and criticism of RPTRA development.

Keywords: RPTRA, 11 Institute of Architecture, Public Participation, Proxemics.

Abstrak

Pembangunan ruang terbuka ramah anak (RPTRA) di Jakarta melibatkan 11 lembaga arsitektur lokal terkemuka tanpa imbalan jasa. Mereka bekerja cepat, melakukan proses perencanaan selama 3-4 bulan. Pada tahun 2016, 188 RPTRA berhasil dibangun dan dioperasikan di seluruh Jakarta. Ironinya, pembangunan yang sebagian menggunakan dana CSR tersebut menuai kritik dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat. Konteks situasi politik saat itu memang cukup panas. Berbagai upaya dilakukan lawan politik menjatuhkan petahana melalui hoax. Untuk menghindari kecaman dan sentimen negatif publik terhadap kinerja pemerintah, maka arsitek dari 11 lembaga tersebut berkumpul menjelaskan kronologi pembuatan RPTRA kepada publik dan media. Melalui event “Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta” masyarakat luas memperoleh informasi real dari berbagai publisitas media. Sejalan dengan dimensi sociopetal dalam teori proksemik, arsitek idealis tersebut memiliki hal-hal yang dianggap searah dengan program pembangunan RPTRA. Keterlibatan mereka dalam pembangunan melalui mekanisme sistem yang transparan sejalan dengan idealisme mereka untuk membangun kota yang dicintai. Partisipasi public ini sekaligus menghentikan kesimpangsiuran informasi, menghapus fitnah dan kritik terhadap pembangunan RPTRA. Tulisan ini menjelaskan satu kasus yang pernah dilakukan untuk menangkal hoax, melalui partisipasi publik dalam sebuah event, dengan sudut pandang arsitek RPTRA, pemrakarsa dan peserta event.

Kata kunci: RPTRA, 11 Lembaga Arsitektur, Partisipasi Publik, Proksemik

Pendahuluan

Menjelang Pilkada serentak tahun 2017, terjadi kesimpangsiuran informasi pada berbagai platform media. Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pasca maraknya penggunaan media sosial membuat pemasar politik memberdayakan media baru ini. Tidak hanya informasi penting dan berguna yang disebarkan untuk menaikkan reputasi calon. Pemasar politik juga berupaya merusak reputasi lawan dengan berbagai berita bohong, yang disebut dengan *hoax*.

Mewabahnya *hoax* melalui media sosial menyebabkan berlimpahnya informasi yang mengaburkan fakta dari realita. Masyarakat sulit memilah informasi yang benar, berlebihan, atau bohong Masyarakat Telematika Indonesia (2017) melansir hasil survey yang memperlihatkan hampir setiap hari sebanyak 44,3% responden menerima *hoax*, dan 92,4% responden mendapatkannya dari media sosial, yaitu dalam aplikasi pesan sebesar 62,8%. (<https://bali.antaranews.com/en/berita/102558/>). Kesimpangsiuran informasi ini sangat meresahkan masyarakat. Namun bagi politisi dan pemasar politik, situasi ini menjadi sangat menguntungkan karena munculnya peluang untuk memperluas khalayaknya.

Keadaan saat itu, di mana daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta obyektif, juga meresahkan orang-orang yang telah bekerja sama mewujudkan idealisme mereka dengan pemerintah. Mereka menyadari benar situasi *post-truth* tersebut hanya dapat dikalahkan dengan melakukan kegiatan yang menciptakan situasi *truth*. Salah satu profesi yang sukses dalam melakukan kerja sama pembangunan dengan pemerintah adalah Arsitek. Belasan arsitek muda Indonesia terlibat dalam proses perancangan 182 RPTRA di Jakarta. Hingga tulisan ini dibuat, masih terus dilaksanakan

pembangun RPTRA tersebut, yang diperkirakan sampai akhir tahun 2017.

Panasnya iklim politik pada akhir tahun 2016, mendorong sebelas orang arsitek perancang RPTRA untuk terlibat langsung melakukan klarifikasi atas kesimpangsiuran berita yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Berita-berita *hoax* yang menjamur di musim pra-kampanye calon gubernur DKI Jakarta itu tidak mampu di atas hanya dengan mengadakan jumpa pers dan liputan media. Arsitek idealis berkumpul untuk langsung menjelaskan kronologis pembuatan RPTRA yang menjadi salah satu prestasi terbaik gubernur DKI Jakarta itu.

Partisipasi arsitek dalam mengatasi kesimpangsiuran informasi terhadap pembangunan RPTRA serta secara langsung menjelaskan fakta sesungguhnya tentang kinerja pemerintah, merupakan hal positif yang cukup signifikan menanggulangi mewabahnya *hoax*. Partisipasi tersebut terkait kedekatan publik dengan figur pemimpinnya, dalam hal ini adalah kesamaan ide atau gagasan dalam membangun sebuah kota metropolitan yang memiliki ruang-ruang terbuka hijau ramah anak. Hal lain yang dianggap turut mendorong partisipasi publik untuk mengikuti *event* tersebut adalah karena telah merasakan secara langsung dampak pembangunan.

Dalam teori proksemik dikenal dimensi sosiofugal dan sosiopetal. Sosiofugal terkait dengan faktor-faktor dalam ruang yang mampu menarik interaksi individu untuk berkomunikasi. Sedangkan sosiopetal berlaku sebaliknya, faktor-faktor yang ada dalam ruang dapat menyebabkan keengganan individu dalam berinteraksi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa keinginan para arsitek untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang publik melalui event ini dikarenakan adanya kesamaan visi untuk membangun ruang-ruang publik yang ramah anak di kota Jakarta. Kedekatan ini juga yang mendorong

mereka untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi akibat persaingan politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu tersebut.

Untuk itu, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah “Mengapa sebelas lembaga arsitektur perancang RPTRA berpartisipasi dalam *event* “Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta” tersebut?” pertanyaan ini diajukan kepada arsitek dan pemrakarsa acara. Sedangkan kepada arsitek, pemrakarsa dan partisipan yang mengikuti *event* (dosen Arsitektur) tersebut adalah “Bagaimana partisipasi publik melalui *event* tersebut dalam menghentikan kesimpangsiuran informasi terhadap pembangunan RPTRA?”

Tinjauan Pustaka

Kota Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau. Pada tahun 2003, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta masih kurang dari 10 persen, atau hanya 2.718,33 hektar dari luas Ibu Kota yang mencapai 66.233 hektar. Padahal sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2010-2030, DKI Menargetkan RTH seluas 30%.. (<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/1/1/03>). Dengan ruang terbuka hijau sebesar 30 persen tersebut, kota Jakarta akan terlihat lebih manusiawi.

Pada tahun 2008, kota Bandung baru memiliki sekitar 1.700 hektar RTH. Sedangkan idealnya kota dengan luas 16,729,65 hektar ini memiliki RTH seluas 6.000 hektar. Menurut data Badan Pengendali Lingkungan Hidup tahun 2007, kota Bandung memiliki 8,76 persen ruang terbuka hijau. Idealnya, sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total luas kota (UU Np. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Hingga tahun 2016, kota Bandung berhasil mencapai RTH sebesar 12,30 persen (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/30>).

Masyarakat kota tersebut menyadari perlunya kota memiliki jumlah RTH yang sesuai dengan luas kota mereka, terutama mahasiswa dan alumni berbagai perguruan tinggi di kota tersebut. Misalnya, lima mahasiswa teknik lingkungan ITB angkatan tahun 2006 dan 2007 mengangkat persoalan Ruang Terbuka Hijau kota Bandung dalam blog mereka secara konsisten (<https://sites.google.com/site/tamanbandung>).

Mereka menjelaskan bahwa manfaat RTH tidak saja dapat dirasakan secara langsung (*tangible*), tetapi juga secara tidak langsung (*intangible*) dalam jangka waktu panjang. RTH juga memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) Fungsi Ekologis, sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂), pelestarian air tanah, penahan angin, ameliorasi iklim, habitat hidupan liar, dan; 2) Fungsi Tambahan (ekstrinsik), sebagai fungsi sosial yang dapat menurunkan stress masyarakat dan menurunkan konflik sosial, fungsi ekonomi melalui penjualan hasil tanaman atau perdagangan kecil, fungsi arsitektural yang menambah nilai keindahan kota. Pada akhirnya, ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kesejahteraan warga dan keindahan kota.

1. RPTRA

Salah satu ruang terbuka hijau yang bermanfaat sosial tinggi adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pembuatan ruang terbuka hijau yang berfungsi aktif sebagai *urban space* bagi warga kota yang ramah anak ini pertama kali digagas oleh istri gubernur DKI Jakarta saat itu. Ibu Veronika Tan, dulunya seorang arsitek, mengagas sebuah ruang terbuka untuk bermain bagi anak-anak di kota Jakarta yang padat. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan dalam riset bersama pakar sosiologi perkotaan, hingga muncullah konsep RPTRA.

Hingga akhir tahun 2016, dibangun 182 RPTRA di seluruh DKI Jakarta. Sebanyak 112 RPTRA dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, sedangkan 70 lainnya dibangun

menggunakan dana CSR dari berbagai perusahaan di Ibukota. Pembangunan dilanjutkan hingga tahun 2017 hingga setiap kelurahan memiliki RPTRA, yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, bersosialisasi, dan melakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Terdapat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, Paket B dan Paket C untuk anak putus sekolah di RPTRA Cibesut, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara (<http://smartcity.jakarta.go.id>).

RPTRA adalah salah satu ruang publik yang ramah anak, tetapi tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Fasilitas RPTRA memungkinkan penduduk sekitarnya untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut dengan nyaman. Dalam kompleks RPTRA ada ruang serba guna, ruang menyusui, lapangan bermain dan olahraga, perpustakaan, dapur, kolam gizi hingga pojok warung yang dapat dimanfaatkan ibu-ibu PKK untuk berjualan, termasuk berjualan hasil karya yang mereka produksi sendiri (<http://mommiesdaily.com/2017/03/01/>).

Karena itulah, RPTRA bisa dimanfaatkan warga Jakarta untuk mengadakan pernikahan, pertunjukan, pelatihan, permainan, bahkan edukasi sebagaimana di RPTRA Cibesut di atas.

Salah satu yang menjadi kendala dalam keberlanjutan fasilitas umum adalah pemeliharaannya. Untuk menjaga dan merawat seluruh fasilitas RPTRA tersebut, ditempatkan petugas pengelola yang digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Mereka berasal dari warga setempat, yang selain bertugas merawat fasilitas juga mendorong warga untuk memiliki sikap positif dalam menjaga, merawat dan memaksimalkan penggunaan fasilitas gratis tersebut. Dalam hal ini, mereka selalu menekankan bahwa RPTRA adalah milik warga yang harus dirawat bersama.

2. Lembaga Arsitektur

Sebelas arsitek mengacu pada sebelas nama lembaga konsultan arsitektur yang berperan dalam perancangan RPTRA itu, terdiri dari Aboday, Andramatin, Arkonin, D-Associate, Graha Cipta Hadiprana, Han Awal and Partners, Nataneke, Studio Tonton, UI Alumni, dan Willis Kusuma Architects (<https://metro.tempo.co/read/850217>).

Kesebelas lembaga konsultan arsitektur tersebut terkemuka di Tanah Air, tetapi untuk mendesain RPTRA ini dilakukan secara “sukarela” alias gratis.

Menurut Avianti Arman, koordinator arsitek dalam acara Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur melihat RPTRA di Jakarta:

"Sebetulnya keterlibatan kami dalam pembangunan RPTRA di Jakarta itu kecelakaan,"

“Mulanya, pihaknya hanya ingin mengajukan konsep pembuatan toilet publik di ruang publik pada Pemprov DKI Jakarta. Namun, usai presentasi, para arsitek justru diajak untuk bergabung dalam pembuatan RPTRA oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).”

(<http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/93981/sebelas-lembaga-arsitek-terbaik-di-balik-rptra-dki-jakarta/2017-02-25>).

Kesebelas arsitek yang terlibat menganggap hal tersebut sebagai tantangan bagi para arsitek. Selama ini mimpi mereka untuk menciptakan ruang terbuka hijau di Jakarta bisa menjadi kenyataan. Dari sisi keprofesian, proyek pembangunan RPTRA ini juga meluaskan cakupan layanan profesi arsitek, yang tidak hanya untuk segelintir klien tetapi untuk masyarakat luas.

Menurut metro.tempo.co, sebanyak 65 dari 188 RPTRA yang diresmikan pemerintah provinsi dibangun dengan dana *corporate social responsibility*. Sedangkan 123 bangunan lainnya dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Sejumlah 123 RPTRA itulah yang kemudian

dirancang oleh sebelas arsitek tersebut. (<https://metro.tempo.co/read/850217/>).

Yori Antar dari Han Awal and Partners, arsitek yang merancang RPTRA Kalijodo, mengatakan bahwa

“Bagi kami, *lien sejati* itu adalah masyarakat. Seperti kata ayah saya, arsitektur Indonesia itu adalah arsitektur yang berguna bagi masyarakat. Kalau melihat begitu banyak orang yang bermain dan bahagia, itu tentu kebahagiaan buat kami”

(<http://mommiesdaily.com/2017/03/01/>).

Sedangkan menurut Willis Kusuma dari Wills Kusuma Architects, yang merancang RPTRA Cempaka Putih Timur, banyak dukungan dari warga selama tahap pembangunan. “kami membangun pun didasarkan pada kebutuhan warga. Warga memberi masukan terlebih dahulu,” kata Willis (<https://metro.tempo.co/read/850217/>). Kedua arsitek tersebut adalah arsitek-arsitek ternama, yang bernaung dalam dua biro arsitek paling terkemuka di Indonesia.

3. Ruang Publik dan Partisipasi Publik

Ruang publik adalah suatu diskursus yang memungkinkan debat-debat dan pengemukakan pendapat terjadi dalam kondisi kesetaraan. Ruang ini meliputi infrastruktur nyata dan norma-norma yang mendukung dan memungkinkan kritik-kritik politik diperbincangkan. Di mana argumentasi rasional dan diskusi kritis yang menjadikan kekuatan argumen menjadi lebih penting dibandingkan identitas si pembicara (Habermas, 2007).

Istilah ‘publik’ sebenarnya secara sempit sinonim dengan ‘apa pun yang terkait dengan negara’. Di mana manusia-manusia privat di bawahnya sebagai sasaran tembak otoritas publik tersebut, merekalah yang sebenarnya membentuk publik (Habermas, 2010). Dalam model liberal ruang publik, media massa memainkan peranan penting dalam menginformasikan dan memandu opini

publik, terutama sejak masyarakat secara simultan mulai menghilangkan batas-batas gender/kelas/ras namun justru menjadikan komunikasi secara langsung di antara para konstituen menjadi sulit. Di sisi lain, komersialisasi media massa menjadikan ruang publik sebagai area retorika dan misi-misi *public relations* dan periklanan justru diprioritaskan. Kepentingan komersial, kapitalisasi ekonomi, dan *mainstream* media berisikan ruang publik penuh kompromi serta wacana publik yang terkolonisasi, dengan televisi sebagai garda terdepan (Habermas dalam Papacharissi, 2010, p. 116).

Dalam masyarakat demokratis sesuai gambaran Habermas, publik terlibat aktif dalam setiap kebijakan pemerintah. Publik memiliki kesempatan untuk mengemukakan pemikirannya sendiri terkait dengan hal-hal yang dibuat pemerintah dalam kota dan lingkungan hidupnya. Publik yang dianggap sebagai ideal ini pada masa Habermas dianggap mustahil dilakukan, sehingga menyebabkan banyak orang berpikir bahwa konsep Habermas tentang ruang publik dalam masyarakat demokratis tersebut utopis.

Keterlibatan publik dalam berbagai urusan pemerintah kota Jakarta sesungguhnya menjawab idealisme Habermas tersebut. Setidaknya dalam masa ketika suhu politik di Jakarta sangat memanas dan muncul kesimpangsiuran informasi, beberapa masyarakat yang berpikiran terbuka dengan idealisme mereka percaya bahwa hal tersebut dapat diredam. Pada masyarakat seperti inilah gagasan Habermas diletakkan. Bahwa menyadari bahwa selalu ada kepentingan dominan yang bisa mempengaruhi ruang dan opini publik, sehingga hanya pada “orang netral” yang masih memiliki semangat meluruskan hal yang tidak benar saja hal tersebut bisa terjadi.

4. Proksemik: *Sociopetal* dan *Sociofugal*

Keberpihakan pada seseorang banyak terjadi karena adanya faktor-faktor yang sama sehingga menimbulkan ketertarikan untuk

mendukungnya. Kesamaan visi antara pada arsitek dengan penguasa kota untuk mengembangkan wajah kota yang lebih hijau dan ramah anak, pada akhirnya merupakan faktor yang mendekatkan dukungan arsitek untuk mendukung gubernur yang berkuasa saat itu.

Dalam tinjauan teori proksemik, yaitu teori yang membahas tentang persepsi ruang dari individu yang berbeda-beda budaya dalam komunikasi, terdapat dimensi *sociofugal* dan *sociopetal*. Joyce Marcella Laurens (2004), mengklasifikasikan ruang personal dan hubungannya dengan desain arsitektur, dalam dua ruang, yaitu: 1) Ruang *Sociopetal* (*Sociopetal*). Ruang *sociopetal* merujuk kepada suatu tatanan yang mampu memfasilitasi interaksi sosial; dan, 2) Ruang *Sosiofugal* (*Sociofugal*). Ruang *sosiofugal* adalah kebalikan dari ruang *sociopetal*. Ruang *sosiofugal* mampu mengurangi terjadinya interaksi (Febriyana & Dwisusanto, 2017, p. 83).

Dalam penelitian ini, ruang *sociopetal* terjadi manakala individu dapat memperoleh makna yang membuatnya mampu berinteraksi secara simbolik dalam ruang-ruang yang ada pada tempat wisata. Sementara pada ruang *sociofugal*, individu tidak mampu memperoleh makna terkait dengan latarbelakangnya, terhadap simbol-simbol ruang yang ada pada tempat wisata tersebut. Makna menjadi penting dalam menekankan interaksi individu terhadap ruang, sehingga memunculkan sensasi pada persepsi ruang mereka (Febriyana & Dwisusanto, 2017, p. 83)

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma interpretif, dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara terhadap arsitek RPTRA Kali Jodo, Bapak Yori Antar dan pelaksana *event* JBA, Ibu Avianti (Vivi), melalui wawancara dengan *whatsapp* pada tanggal 21 dan 22 November 2017.

Data sekunder selain diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang dosen Arsitektur, yaitu Ibu Galuh, Ibu Uras, dan Bapak Sahala. Selain itu, terdapat data yang diperoleh melalui berbagai literatur *online* dan *offline*, untuk digunakan sebagai pendukung hasil wawancara maupun pembuatan kerangka pemikiran.

Peneliti selain sebagai pewawancara, juga terlibat secara langsung dalam event, sehingga mendapat kesempatan untuk mengamati secara langsung (*observasi partisipan*). Karena keterbatasan waktu pengumpulan materi untuk mengikuti konferensi nasional komunikasi ISKI 2017, maka penelitian ini melakukan pembahasan langsung dari hasil wawancara tanpa menggunakan *coding*.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat dua pendapat yang memiliki perspektif berbeda tentang partisipasi publik dalam hal ini adalah 11 orang arsitek profesional untuk terlihat dalam “Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta” pada tanggal 25 Februari 2017.

Menurut Bapak Ir. Yori Antar, kegiatan *event* tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegiatan profesional yang dilakukan para arsitek dalam merancang RPTRA, dan tidak ada sangkut pautnya dengan politik:

“Ini program bagus yang duitnya ga dikemplang.. (saya) kapok dengan proyek DKI, yang di-*smack down*, terus dananya di *mark-up*. Sebagai arsitek saya tidak mau terlibat dalam dana-dana yang tidak jelas.. karena itu berarti ikut dalam bagian korupsi”

“Saya ingin berpartisipasi membangun kota yang lebih baik. Semua arsitek itu mestinya punya idealisme begitu.. Ada 300-an RPTRA yang akhirnya selesai dibangun sampai periode Djarot. RPTRA itu hanya satu proyek kecil yang bisa mengajak arsitek tanpa tender, sebab pakai dana CSR atau KLB, hanya sebagian kecil

saja dari dana APBD yang tidak di.....kan, makanya bisa tunjuk arsitek. Sebabnya itu maka arsitek menjadi nyaman, tenang, karena dana-dana tidak di *mark-up*. Bayangkan satu RPTRA hanya perlu 600 juta, itu sudah memiliki banyak ruang untuk kegiatan.. “

“Sayang saja kalau ruang ibu dan anak mau dijadikan ruang jomblo. Ibu itu kan perlu punya ruang, sebab sehari-harinya mereka tinggal di rumah yang kecil mengurus anak-anak selagi suaminya bekerja.. mereka juga perlu ruang terbuka yang menjadi perpanjangan bagi rumahnya yang sempit.”

Sementara menurut Ibu Vivi, latar belakang *event* dikarenakan situasi yang memanas akibat Pilkada:

“Latarbelakangnya sebetulnya memang karena kita mau kasih tahu program yang baik yang sudah dilakukan pemda, tetapi sedikit yang tahu..”

“Karena waktu itu kan lagi *heated situation* akibat pemilu. Dan banyak orang *gak* percaya bahwa memang RPTRA itu sudah ada dan sudah sebanyak itu dan sudah tersebar di seluruh Jakarta.”

Berdasarkan wawancara dari dua informan diketahui, bahwa sebagai seorang arsitek profesional yang telah puluhan tahun memiliki pengalaman kerja, memiliki idealisme untuk memiliki kota yang lebih baik melalui mekanisme pembangunan yang tepat. Idealisme perancang tersebut tidak terkait dengan politisasi kampanye, sehingga kehadiran mereka dalam *event* dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus mereka kerjakan dalam profesi perancang.

Sementara dalam sudut pandang pencetus *event*, hal-hal baik yang nyata dalam pembangunan mesti diketahui oleh publik. Tentunya agar publik dapat menilai secara adil terhadap kinerja dari pemerintah yang sedang

berlangsung. Tindakan ini dilakukan karena sebagai salah seorang arsitek yang terlibat dalam perancangan RPTRA, ia mengetahui banyak tentang pembangunan RPTRA yang tersebar di seluruh kota Jakarta.

Demikian juga keterlibatan arsitek dalam *event* menjadi suatu hal yang mesti dilakukan karena terkait dengan profesionalisme profesi. Berbeda dengan penyelenggara *event* yang lebih melihat persoalan keadilan yang perlu diakui.

Manurut Bapak Ir. Yori Antar, semua arsitek yang terlibat merasa perlu untuk turun dalam *event* tersebut:

“Ya mengapa tidak? Aneh saja kalau ada arsitek yang tidak mau ikut dalam *event* tersebut.... Semua arsitek yang terlibat dalam pembuatan RPTRA hadir dalam *event* tersebut.”

Sedangkan menurut Ibu Vivi, kelompok arsitek mau bersikap *fair* terhadap kinerja gubernur saat itu:

“Kita (kelompok arsitek) mau *fair* saja:kalau memang prestasinya baik ya harusdiakui.”

Menurut Bapak Ir. Yori Antar, keinginan untuk terlibat dalam perancangan RPTRA ini dikarenakan adanya kesamaan visi untuk membangun kota Jakarta, dengan menggunakan sistem yang benar:

“Sebelas arsitek awalnya diminta untuk merancang toilet-toilet di Monas. Tetapi karena Monas jadi kawasan bebas bangunan, tidak boleh ada bangunan, jadi dialihkan ke RPTRA”

“Saya sudah terlibat dalam proyek DKI sejak lama, sejak masa Sutiyoso. Saya sudah tahu bagaimana... Baru pada masa Ahok saja tidak terjadi..”

Hal ini menjelaskan bahwa partisipasi publik terjadi karena publik tidak lagi sebagai oknum yang dapat dibohongi, dan punya

pemikirannya sendiri. Dengan adanya sistem yang dapat dikontrol oleh publik (terbuka), maka terjadi kesamaan atas makna pembangunan, dan karenanya muncul kedekatan yang menimbulkan simpati dan dukungan publik.

Kesimpulan

Kelompok profesional merupakan bagian dari publik yang paling mengetahui perkembangan di bidangnya dibanding masyarakat lain. Karena itu, kebohongan yang disebabkan berita *hoax* paling tepat bila diklarifikasi oleh para profesional yang terkait. Dalam kasus penyelenggaraan event “Tur Bersama 11 Lembaga Arsitektur Melihat RPTRA di Jakarta”, diketahui bahwa para arsitek yang mau terlibat adalah mereka yang merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap kota dan sistem yang ada. Keterlibatan tersebut bukan karena tuntutan bisnis semata, tetapi karena idealisme profesi mereka sebagai seorang arsitek perancang lingkungan yang selalu memimpikan kota yang lebih baik bagi warganya.

Pembuatan event tersebut menjadi satu contoh kasus yang dapat dilakukan profesional sebagai bagian dari publik, untuk mendekatkan masyarakat pada realitas dan menghindari emosi karena kebohongan. Penelitian ini hanya memberikan gambaran tentang program kegiatan yang dapat dilakukan untuk menangkal *hoax* dan membalikkan kebohongan *post-truth* melalui sosialisasi *truth*. Sayangnya belum banyak profesi yang mau terlibat dalam memberantas *post-truth* seperti 11 arsitek ini.

Sebagai penutup, saya menyarankan kepada insan-insan komunikasi yang terkemuka, agar dapat mengembangkan ilmunya untuk tidak semata-mata memikirkan keuntungan finansial. Sebagai kaum yang paling mengetahui persoalan dan data *up-date* dalam ilmunya, mereka diharapkan dapat mendorong stimulus rekan seprofesi mencapai idealisme ilmu, melalui keterlibatan secara aktif dalam menciptakan event di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hopkins, R. 2008. *What Do We See in Film?* TheJournal of Aesthetics and Art Criticism Vol. 66 No.2 Spring 2008. The American Society for Aesthetics. Washington.
- Jancovich, M. 2003. *Defining Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste*. Manchester University Press. England.
- Jenkins, H. 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. NYU Press. US.
- Katilius-Boydston, M. 1990. The Semiotics of A. J. Greimas: an Introduction, *Lituanus: Lituanian Quaterly Journal of Arts and Sciences*. Vol. 36 No. 3 Fall 1990. downloaded March 29th, 2016 http://www.lituanus.org/1990_3/90_3_02.htm.
- Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. 2006. *Reading Images: The Grammar of Visual Design, Second Edition*. Routledge. New York.
- Pickard, Alison Jane. 2007. *Research Methods in Information*. Facet Publishing. London.
- Rose, G. 2007. *Visual Methodologies: An Introduction to Interpretation of Visual Materials, Second Edition*. Sage Publications. London.
- Strauss, A. L., & Corbin, J. .1998. *Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd Edition. utg.). Sage Publications. London.
- Wilson, G. 2006. Transparency and Twist in Narrative Fiction Film. Dalam *Thinking Through Cinema: Film as Philosophy*. Blackwell Publishers. New